

Does E-Government Maturity Enhance Transparency and Public Accountability in Local Government Finance? (An Empirical Study on Regency Governments in Indonesia 2020–2022)

Wiwin Juliyanti

Universitas PGRI Madiun

wiwin@unipma.ac.id

Rollis Ayu Ditasari

Universitas PGRI Madiun

rolisayuditasari@unipma.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh determinan teknologi terhadap akuntabilitas publik pemerintah daerah di Indonesia, dengan mempertimbangkan variabel seperti e-Government maturity, aksesibilitas situs web, visibilitas media, dan pengadaan elektronik. Menggunakan pendekatan kuantitatif, studi ini menganalisis data sekunder dari laporan keuangan pemerintah daerah pada tahun 2020–2022 dengan metode regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengembangan teknologi, aksesibilitas situs web, dan visibilitas media memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik, sedangkan jaringan telekomunikasi, akses internet, e-Government, dan pengadaan elektronik tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun beberapa faktor teknologi, seperti aksesibilitas situs web dan eksposur media, berperan penting dalam memperkuat akuntabilitas publik, aspek lain seperti e-Government dan e-procurement masih memerlukan penguatan agar dapat memberikan dampak yang lebih berarti. Hal ini menekankan pentingnya strategi optimalisasi implementasi teknologi oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada pengukuran e-Government yang hanya didasarkan pada program Smart City, tanpa mempertimbangkan dimensi lain seperti integrasi sistem, keterbukaan data, dan adopsi teknologi oleh publik. Studi ini memberikan kontribusi penting bagi pemerintah daerah dengan menawarkan wawasan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui optimalisasi teknologi, serta merekomendasikan penelitian selanjutnya untuk memperluas cakupan data, menambahkan variabel kesiapan teknologi, dan menggunakan metode pengukuran yang lebih komprehensif guna meningkatkan validitas temuan penelitian..

Kata Kunci

Akuntabilitas Publik, Pemerintahan Digital (E-Government), Teknologi, Pemerintah Daerah, Transparansi

PENDAHULUAN

Reformasi sektor publik di Indonesia telah membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan, khususnya dengan diterapkannya otonomi daerah. Kebijakan ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah tingkat I (provinsi) dan tingkat II (kabupaten/kota) untuk mengelola urusan pemerintahan secara mandiri, namun tetap berlandaskan asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai agen dalam hubungan keagenan pemerintahan, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab kepada masyarakat sebagai

principal utama dalam sistem demokrasi (La Adu et al., 2022)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur serta mengurus sendiri kepentingan masyarakat setempat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Implementasi otonomi daerah ini menciptakan tantangan dalam tata kelola keuangan daerah, terutama dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menjadi instrumen utama dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah, digunakan untuk merumuskan kebijakan fiskal dan perencanaan anggaran (Amri et al., 2022).

Seiring dengan reformasi administrasi publik, tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah semakin meningkat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamankan peningkatan kualitas manajemen keuangan pemerintah guna mendukung penyusunan laporan keuangan yang lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini diperkuat oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yang mengadopsi basis akuntansi kas menuju akrual untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan sektor publik (Ibrahim et al., 2020)

Dalam perspektif ini, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi faktor determinan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik. Penerapan e-Government dalam pemerintahan daerah telah menjadi strategi utama dalam modernisasi tata kelola pemerintahan. Perkembangan TIK memungkinkan pemerintah daerah untuk mempublikasikan laporan keuangan dan informasi terkait kepada masyarakat secara lebih mudah melalui berbagai platform digital, seperti situs web resmi pemerintah, media sosial, dan portal keterbukaan informasi. Implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menegaskan pentingnya akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan (Octavio & Urumsah, 2023)

Meskipun berbagai regulasi telah mengatur kewajiban transparansi dan akuntabilitas, penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia masih bervariasi. Studi oleh Ibrahim et al., (2020) menemukan bahwa tingkat kepatuhan mandatory disclosure terhadap standar akuntansi pemerintahan masih tergolong moderat. Hasil penelitian lain oleh Octavio dan Urumsah (2023) menunjukkan bahwa e-Government maturity, kualitas laporan keuangan, dan sistem akuntabilitas pemerintah daerah secara signifikan mempengaruhi transparansi digital. Perbedaan tingkat pengungkapan ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penuh dalam pengelolaan keuangan daerah.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penerapan e-Government yang matang (e-Government maturity) menjadi solusi yang semakin relevan dalam meningkatkan akuntabilitas publik pemerintah daerah. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pemerintah daerah diwajibkan untuk mengintegrasikan berbagai sistem manajemen keuangan, termasuk pelaporan keuangan, pengadaan barang dan jasa, perencanaan anggaran, serta tata kelola pendapatan daerah dalam satu sistem digital yang terintegrasi. Dengan adanya integrasi ini, diharapkan pemerintah daerah dapat menyajikan informasi keuangan secara real-time, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya (Basri et al., 2022).

Dalam penelitian ini, e-Government maturity akan dikaji sebagai variabel utama yang berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas publik pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana tingkat kematangan e-Government berkontribusi dalam meningkatkan transparansi, pengungkapan informasi, serta kepatuhan pemerintah daerah terhadap standar akuntansi pemerintahan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan strategi implementasi e-Government dalam rangka meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek pemerintahan, termasuk di Indonesia.

Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada periode 2019-2022, kebutuhan pemerintah terhadap TIK mengalami peningkatan yang pesat. Pada tahun 2019, belanja pemerintah di sektor TIK mencapai 12,7 triliun rupiah dan terus meningkat hingga mencapai 30,5 triliun rupiah dalam rencana anggaran tahun 2022. Rata-rata kenaikan belanja sekitar 10% setiap tahun ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi dalam pemerintahan telah menjadi kebutuhan mendesak, terutama dalam mendukung transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas publik ([Katharina 2021](#)).

Transformasi digital dalam pemerintahan semakin relevan seiring dengan munculnya pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak awal tahun 2020. Pandemi ini memaksa banyak sektor, termasuk pemerintahan, untuk melakukan adaptasi terhadap sistem kerja berbasis digital. Dalam upaya menekan penyebaran virus, kebijakan Work From Home (WFH) diberlakukan secara luas, sehingga memaksa pemerintah untuk mengadopsi teknologi dalam menjalankan berbagai aktivitas administrasi dan pelayanan publik. Hal ini mempercepat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-Government di berbagai tingkat pemerintahan, termasuk pemerintah daerah ([Arief & Abbas, 2022](#)).

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018, yang menekankan pentingnya pemanfaatan TIK dalam tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Tujuan utama dari SPBE adalah menciptakan pemerintahan yang lebih modern, integratif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah, sebagai bagian dari sistem pemerintahan nasional, dituntut untuk mengembangkan dan menerapkan sistem digital guna meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan keuangan daerah. Dalam hal ini, kematangan penerapan E-Government atau E-Government Maturity menjadi aspek krusial yang perlu diteliti dalam aspek akuntabilitas publik ([Octavio & Urumsah, 2023](#)).

Akuntabilitas publik dalam pemerintahan daerah merupakan salah satu aspek fundamental yang menentukan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah diwajibkan untuk menerapkan sistem berbasis elektronik dalam mengelola keuangan dan menyajikan laporan yang transparan. Keterbukaan informasi keuangan daerah menjadi salah satu indikator utama dalam mengukur tingkat akuntabilitas publik pemerintah daerah. Oleh karena itu, kematangan e-government diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah ([Katharina, 2021](#)).

Dalam kondisi pandemi COVID-19, penggunaan e-government menjadi semakin vital. Pemerintah daerah dituntut untuk memastikan kelancaran layanan publik secara daring, mulai dari perizinan, administrasi kependudukan, hingga pengelolaan anggaran daerah. Sistem kerja berbasis digital yang diterapkan selama pandemi memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana e-government dapat berperan dalam meningkatkan akuntabilitas publik. Namun, [Silaban \(2020\)](#) menjelaskan bahwa implementasi e-government di tingkat daerah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti infrastruktur yang belum merata, literasi digital yang belum optimal, serta resistensi terhadap perubahan dari aparatur sipil negara. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kematangan e-government berpengaruh terhadap akuntabilitas publik di pemerintah daerah tingkat II atau kabupaten, dengan menggunakan data tahun 2021 sebagai sampel. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi pengembangan kebijakan pemerintah dalam mempercepat transformasi digital di sektor publik. Dengan memahami hubungan antara kematangan e-government dan akuntabilitas publik, pemerintah daerah dapat merancang strategi yang lebih efektif dalam mengadopsi teknologi guna meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan terpercaya di masa mendatang ([Sari dan Muslim, 2023](#)).

Transformasi digital dalam sektor pemerintahan telah menjadi kebutuhan mendesak seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas layanan publik di Indonesia ([Choirunnisa et al., 2023](#)). Namun,

implementasi SPBE di tingkat daerah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital, dan resistensi terhadap perubahan dari aparatur sipil negara (ASN) ([Hasanah et al., 2024](#)). Pandemi COVID-19 yang melanda sejak tahun 2020 telah mempercepat adopsi teknologi dalam berbagai aspek pemerintahan. Kebijakan kerja dari rumah (*work from home*) mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan platform digital dalam pelayanan publik, pengelolaan administrasi, dan pengambilan keputusan berbasis data secara real-time ([Hasan et al., 2024](#)). Situasi ini menyoroti pentingnya sistem e-government yang adaptif dan berkelanjutan dalam menghadapi krisis.

Penerapan SPBE diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, yang bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Di tingkat daerah, SPBE tidak hanya berfokus pada digitalisasi layanan administrasi, tetapi juga pada peningkatan partisipasi publik dalam pengawasan kebijakan ([Choirunnisa et al., 2023](#)). Melalui teknologi informasi, masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi terkait anggaran, kebijakan publik, dan kinerja pemerintah, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Keberhasilan implementasi SPBE sangat bergantung pada tingkat kematangan e-government di setiap daerah. Daerah dengan tingkat kematangan e-government yang lebih tinggi cenderung mampu menyediakan layanan publik yang lebih cepat, responsif, dan berbasis data ([Choirunnisa et al., 2023](#)). Namun, masih terdapat disparitas dalam implementasi e-government di Indonesia, terutama antara daerah perkotaan dan terpencil, yang disebabkan oleh tantangan seperti keterbatasan infrastruktur teknologi dan rendahnya literasi digital ([Hasanah et al., 2024](#)).

Dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, e-government berperan penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas publik. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mewajibkan pemerintah daerah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam mengelola anggaran dan keuangan. Dengan sistem berbasis teknologi, penyimpangan anggaran dapat diminimalisir, proses pelaporan menjadi lebih akurat, dan mekanisme audit serta pengawasan dapat dilakukan secara lebih efektif ([Choirunnisa et al., 2023](#)).

Namun, implementasi e-government di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek keamanan data dan kesiapan infrastruktur digital. Seiring meningkatnya ketergantungan terhadap teknologi, risiko serangan siber terhadap sistem pemerintahan juga semakin tinggi. Oleh karena itu, kesiapan infrastruktur keamanan siber menjadi faktor krusial dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan berbasis elektronik ([Choirunnisa et al., 2023](#)). Selain itu, diperlukan kebijakan yang mendukung interoperabilitas sistem antarlembaga agar data dapat terintegrasi dengan lebih baik dan meminimalisir fragmentasi layanan.

Secara keseluruhan, pandemi COVID-19 telah mempercepat transformasi digital dalam sektor pemerintahan, mendorong pemerintah daerah untuk lebih serius dalam mengadopsi e-government guna meningkatkan akuntabilitas publik. Dengan semakin matangnya implementasi SPBE, diharapkan tata kelola pemerintahan daerah dapat berjalan lebih transparan, efisien, dan partisipatif, sehingga mendukung terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana tingkat kematangan e-government berpengaruh terhadap akuntabilitas publik pemerintah daerah, khususnya dalam kondisi pascapandemi COVID-19 yang telah mengubah cara kerja birokrasi dan administrasi publik secara signifikan.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membuka peluang strategis bagi pemerintah untuk melakukan transformasi birokrasi melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *e-government*. SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelayanan publik kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku usaha, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya ([Kementerian PANRB, 2021](#)). Pemanfaatan teknologi dalam sistem pemerintahan ini berkontribusi dalam menciptakan tata kelola yang lebih terbuka (*open government*), partisipatif, inovatif, dan akuntabel ([Choirunnisa et al., 2023](#)). Selain itu, penerapan SPBE dinilai mampu meminimalkan risiko penyalahgunaan wewenang melalui penerapan sistem pelaporan dan pengaduan berbasis elektronik yang lebih transparan dan dapat diakses publik, termasuk dalam aspek keterbukaan informasi keuangan daerah ([Hasanah et al., 2025](#)).

Seiring dengan akselerasi digitalisasi, pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang akuntansi,

pelaporan, dan pengungkapan informasi keuangan semakin ditunjang oleh pemanfaatan platform digital. Teknologi seperti situs web resmi pemerintah daerah, akses internet pribadi, komputasi awan (*cloud computing*), Internet of Things (IoT), analitik *big data*, serta kecerdasan buatan (AI) telah memperkuat infrastruktur implementasi e-government (Hasan et al., 2024). Efektivitas pelaksanaan SPBE dalam mendorong akuntabilitas publik sangat dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur digital yang mencakup ketersediaan jaringan telekomunikasi, aksesibilitas internet, layanan publik berbasis daring, serta kebijakan belanja elektronik oleh pemerintah daerah (Choirunnisa et al., 2023).

Seluruh laporan keuangan yang disusun oleh entitas pelapor pemerintah daerah wajib diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagaimana diatur dalam [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara](#). Hasil audit dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan mencerminkan kualitas penyusunan, penyajian, serta kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam beberapa tahun terakhir, penerapan SPBE menjadi fokus utama dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah, yang tercermin dalam hasil audit BPK atas laporan keuangan tahun 2019 dan dievaluasi lebih lanjut pada pertengahan tahun 2020, ketika kebijakan *Work From Home* (WFH) diberlakukan akibat pandemi COVID-19 (BPK RI, 2020).

Meskipun reformasi sektor publik di Indonesia melalui kebijakan otonomi daerah telah meningkatkan desentralisasi fiskal, tantangan dalam mencapai transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah masih menjadi persoalan krusial (La Adu et al., 2022; Amri et al., 2022). Peraturan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengamanatkan transparansi dan pertanggungjawaban fiskal. Namun, implementasi di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan antar-daerah, baik dalam kualitas laporan keuangan maupun keterbukaan informasi publik (Ibrahim et al., 2022). Dalam konteks ini, kematangan e-Government atau *e-Government maturity* menjadi salah satu solusi yang mulai banyak dilirik sebagai strategi untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah.

Berbagai studi menunjukkan bahwa penerapan e-Government berpotensi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya melalui penguatan sistem pelaporan keuangan dan keterbukaan informasi (Octavio & Urumsah, 2023; Katharina., 2021). Akan tetapi, indikator yang digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya cenderung masih terbatas, seperti mengandalkan kehadiran situs web, fitur *Smart City*, atau aspek visualisasi data semata, tanpa mengkaji secara mendalam integrasi sistem digital, partisipasi publik, atau adopsi data terbuka. Bahkan pada daerah yang telah memiliki tingkat *maturity e-Government* tinggi, masih ditemukan kasus rendahnya kualitas akuntabilitas keuangan, sehingga menimbulkan *research gap* yang belum banyak dijawab secara empiris.

Penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Ibrahim et al., (2020), Octavio dan Urumsah (2023), serta Basri et al., (2022), memang telah menunjukkan korelasi positif antara kematangan e-Government dengan transparansi fiskal dan akuntabilitas. Namun demikian, sebagian besar dari mereka menggunakan pendekatan data cross-sectional atau menggunakan indikator tunggal yang tidak mencerminkan kompleksitas sistem SPBE secara komprehensif. Belum ada studi yang secara khusus menggunakan pendekatan *panel data* multi-tahun serta menguji model jalur atau *mediation model* dengan pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai variabel perantara dalam hubungan antara *e-Government maturity* dan akuntabilitas publik.

Berdasarkan identifikasi gap tersebut, penelitian ini hadir dengan tiga kontribusi utama. Pertama, menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis panel data periode 2020–2022 dari 150 pemerintah kabupaten, menghasilkan 750 observasi, sehingga memberikan kekuatan statistik yang lebih solid dibandingkan studi-studi sebelumnya. Kedua, penelitian ini mengembangkan pengukuran e-Government maturity secara multi-dimensi, mencakup integrasi sistem keuangan, keterbukaan data, serta adopsi layanan publik digital sebagai indikator utama. Ketiga, penelitian ini menguji *model mediasi* dengan disclosure LKPD sebagai variabel intervening, yang akan memberikan pemahaman lebih jelas mengenai jalur pengaruh antara teknologi dan akuntabilitas publik.

Dengan pendekatan ini, penelitian ini tidak hanya memperluas kerangka teoritis dan empiris dalam bidang akuntansi sektor publik dan manajemen pemerintahan, tetapi juga memberikan

sumbangan praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan prioritas pengembangan sistem informasi yang berdampak langsung pada tata kelola yang lebih akuntabel. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa sekadar meningkatkan tingkat maturity teknologi belum tentu berimplikasi pada akuntabilitas fiskal, tanpa disertai integrasi sistem pelaporan dan partisipasi publik yang aktif

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan teknologi dalam implementasi SPBE dengan fokus pada dimensi TIK. Variabel-variabel yang dianalisis mencakup ketersediaan jaringan telekomunikasi, tingkat akses internet, pengembangan teknologi informasi, penerapan *e-government*, aksesibilitas situs web pemerintah daerah, visibilitas informasi keuangan, serta belanja elektronik pemerintah. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh BPK selama periode 2020–2022, yakni periode yang bertepatan dengan masa pandemi COVID-19 yang mempercepat digitalisasi proses administrasi dan pelaporan keuangan di sektor publik.

LANDASAN TEORI

Teori Keagenan

Teori keagenan (*agency theory*) merupakan salah satu pendekatan utama yang menjelaskan hubungan kontraktual antara dua pihak, yaitu *principal* dan *agent*. Dalam hubungan ini, pihak *principal* memberikan kewenangan kepada *agent* untuk bertindak atas nama dan kepentingannya. [Jensen dan Meckling \(1976\)](#) dan [Yazdipour & Song \(1986\)](#) pertama kali memperkenalkan konsep ini dalam konteks korporasi, namun telah banyak diadaptasi dalam kajian sektor publik, termasuk akuntabilitas pemerintahan. Dalam konteks pemerintahan, masyarakat berperan sebagai *principal*, sementara pemerintah (eksekutif dan legislatif) bertindak sebagai *agent* yang diberi mandat untuk mengelola sumber daya publik.

Hubungan keagenan dalam sektor publik mengandung potensi permasalahan, terutama yang berkaitan dengan *asymmetric information*, yaitu kondisi ketika *agent* memiliki informasi yang lebih lengkap dibandingkan *principal*. Ketimpangan informasi ini dapat menimbulkan dua bentuk risiko keagenan, yaitu *adverse selection* (pemilihan yang merugikan) dan *moral hazard* (perilaku oportunistik), di mana *agent* berpotensi menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, bukan untuk kepentingan publik ([De Simone et al., 2021](#); [Mardiasmo & Djamhuri, 2022](#)). Oleh karena itu, diperlukan sistem monitoring dan mekanisme pertanggungjawaban yang kuat, seperti audit keuangan dan transparansi informasi, untuk meminimalkan risiko tersebut.

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi salah satu upaya strategis dalam memperkecil asimetri informasi antara pemerintah dan masyarakat. Teknologi informasi mendukung penciptaan sistem pelaporan dan pengawasan berbasis digital yang memungkinkan *principal* (masyarakat) memperoleh akses yang lebih luas terhadap informasi kinerja dan keuangan pemerintah daerah ([Kristian, 2023](#)). Dengan demikian, SPBE tidak hanya meningkatkan efisiensi birokrasi, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk memperkuat akuntabilitas publik dalam kerangka teori keagenan. Secara keseluruhan, teori keagenan tetap relevan dalam menjelaskan hubungan dan dinamika antara masyarakat dan pemerintah daerah, terutama dalam konteks pengelolaan keuangan publik. Ketika pemerintah mampu mengurangi kesenjangan informasi melalui mekanisme transparansi dan pelaporan digital, maka kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah pun dapat meningkat, dan konflik kepentingan antara *agent* dan *principal* dapat diminimalkan ([Busdir, 2023](#)).

Akuntabilitas Publik

Mulgan (2000) menyatakan bahwa konsep akuntabilitas tidak hanya mencakup tuntutan terhadap perilaku individu, tetapi juga kewajiban organisasi untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Sinclair (1995) menegaskan bahwa akuntabilitas pemerintah yang berasal dari lembaga independen cenderung lebih dipercaya oleh masyarakat. Akuntabilitas dalam sektor publik berarti bahwa pemerintah harus mempertanggungjawabkan segala kegiatan dan kebijakan yang dilakukan kepada masyarakat (Mardiasmo, 2009). Menurut Mardiasmo (2009), akuntabilitas publik dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Selain itu,

terdapat empat dimensi akuntabilitas, yakni akuntabilitas probabilitas dan legalitas, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, serta akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas publik dalam sektor pemerintahan tidak hanya bergantung pada kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga pada penerapan sistem akuntansi berbasis teknologi yang dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi laporan keuangan (Juliyanti, 2024)

Determinisme Teknologi

McLuhan (1964) mengemukakan teori determinisme teknologi yang menyatakan bahwa teknologi merupakan faktor utama dalam membentuk kehidupan manusia, karena memiliki pengaruh yang signifikan terhadap masyarakat. Hubungan antara teknologi dan masyarakat dapat dilihat dari sejauh mana perkembangan teknologi telah mengubah budaya dan organisasi sosial. Apa (2013) mendefinisikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai ruang lingkup yang mencakup komputer, internet, serta sistem komunikasi elektronik seperti radio, televisi, dan proyektor. Organisasi Pangan dan Pertanian (2016) mendefinisikan TIK sebagai teknologi yang mencakup internet, telepon seluler, komputer, jaringan, perangkat lunak, konferensi video, jejaring sosial, aplikasi, serta layanan media digital lainnya.

Jaringan Telekomunikasi

Gijrath (2017) mengklasifikasikan layanan seperti Internet of Things (IoT), komunikasi *Machine to Machine* (M2M), alokasi frekuensi sinyal G, transmisi data seluler, dan layanan broadband berbasis jaringan serat optik sebagai bagian dari infrastruktur telekomunikasi. Di Indonesia, telekomunikasi jaringan diatur dalam Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999, yang mendefinisikan telekomunikasi sebagai serangkaian perangkat dan layanan yang digunakan untuk mendukung komunikasi. Dalam konteks pemerintahan, akuntansi manajemen berbasis teknologi dapat membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat dengan menyediakan informasi keuangan yang akurat dan *real-time* (Juliyanti, 2024).

Akses Internet

Leiner et al. (2009) mendefinisikan internet sebagai infrastruktur informasi global yang berkembang melalui proses kompleks, melibatkan berbagai aspek teknologi, organisasi, dan komunitas. Internet tidak hanya berperan dalam bidang teknis komputer, tetapi juga dalam komunikasi dan interaksi masyarakat secara global. Dalam sudut pandang ini, akses internet mengacu pada kemampuan individu atau organisasi untuk terhubung ke jaringan internet guna mengakses berbagai informasi dan layanan digital.

Perkembangan Teknologi

Teknologi secara umum dapat didefinisikan sebagai alat atau sarana yang berkembang dari benda fisik dan keterampilan hingga menjadi konsep yang lebih abstrak Rip & Kemp dalam Roland (2016). Jaffe et al. (2001) mendefinisikan perkembangan teknologi sebagai suatu proses yang mencakup penemuan, inovasi, serta difusi teknologi yang terus berkelanjutan. Dalam ruang lingkup Teknologi Informasi dan Komunikasi, perkembangan teknologi diukur berdasarkan kemajuan infrastruktur, peningkatan keterampilan, serta perluasan penggunaan teknologi dalam berbagai bidang.

Pemerintahan Berbasis Elektronik

Wescott (2001) mendefinisikan *e-government* sebagai pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam mengelola sumber daya pemerintahan secara efektif dan efisien. Tujuan utama dari *e-government* adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memberikan akses informasi yang lebih luas bagi masyarakat.

Aksesibilitas Jaringan

Aksesibilitas situs web didefinisikan sebagai kemampuan suatu situs untuk dapat diakses oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas (Bradbard & Peters, 2010). Abanumy et al.

(2005) menambahkan bahwa desain situs web yang inovatif, menarik, dan mudah digunakan merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan transparansi dan keterjangkauan layanan pemerintahan. Dengan demikian, aksesibilitas situs web pemerintah menjadi aspek krusial dalam meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan publik.

Visibilitas Media

Laswell (1988) menjelaskan bahwa media massa memiliki tiga fungsi utama, yaitu sebagai pengawas lingkungan, penghubung antar elemen masyarakat, serta penyampai warisan sosial. Dalam kerangka pemerintahan daerah, visibilitas media mengacu pada sejauh mana pemberitaan mengenai kebijakan dan kinerja pemerintah dapat menjangkau masyarakat luas melalui berbagai teknologi komunikasi.

Pengeluaran Pemerintah Berbasis Elektronik

Belanja pemerintah mencakup pembelian barang dan jasa, konsumsi, investasi publik, serta transfer pembayaran. Penerapan sistem informasi akuntansi dalam pemerintahan desa berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, yang pada akhirnya mendukung akuntabilitas dan pengawasan publik (Juliyanti, 2024). Anderson (2006) menyatakan bahwa dalam arti sempit, pemerintah berperan sebagai pembeli barang dan jasa yang signifikan, di mana belanja barang dikategorikan menjadi operasional, non-operasional, belanja Badan Layanan Umum, serta belanja barang publik. Seiring perkembangan teknologi, pemerintah Indonesia telah menerapkan sistem e-procurement atau pengadaan barang dan jasa secara elektronik melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Kerangka Riset

Scott (2009) menyatakan bahwa untuk mengatasi konflik kepentingan antara pemerintah dan masyarakat, diperlukan standar akuntansi sebagai pedoman dalam pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan berbasis teknologi informasi dapat mengurangi biaya keagenan dengan meningkatkan transparansi dan kemudahan akses informasi. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memungkinkan pemerintah untuk menjalankan fungsi pengawasan dengan lebih efisien dan biaya yang lebih rendah. Akuntabilitas pemerintah dapat diperkuat melalui penerapan prinsip *Good Corporate Governance* yang meliputi akuntabilitas, transparansi, tanggung jawab, dan keadilan. Bertot et al. (2010) menegaskan bahwa kemudahan akses informasi publik melalui teknologi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Hipotesis Penelitian

Terwujudnya akuntabilitas melalui audit laporan keuangan pemerintah bertujuan untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Biaya keagenan yang timbul dalam proses ini mencakup biaya pengawasan oleh prinsipal, biaya bonding oleh agen, serta kerugian residual. Oleh karena itu, pengelolaan laporan keuangan yang efektif dan efisien melalui penerapan konsep *Good Corporate Governance* menjadi strategi utama dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Kominfo (2015) menjelaskan bahwa distribusi Base Transceiver Station (BTS) di daerah di luar Pulau Jawa berdampak pada kesenjangan akses informasi bagi masyarakat. Untuk memperluas jangkauan pemerataan informasi dan meningkatkan transparansi pelayanan publik, pemerintah telah membangun ribuan BTS yang mampu menjangkau seluruh desa di Indonesia. Dengan demikian, urgensi dan manfaat jaringan 4G tercermin melalui infrastruktur fisik BTS yang berfungsi sebagai sarana utama penyebaran informasi di berbagai wilayah (Kominfo, 2020). Pembangunan menara BTS di Indonesia mencerminkan meningkatnya kebutuhan telekomunikasi masyarakat (Kennedy et al., 2024).

Jaringan telekomunikasi mencakup berbagai bentuk, seperti jaringan seluler, Wi-Fi, transfer energi nirkabel, televisi frekuensi, radio frekuensi, internet, dan satelit. Teknologi ini memiliki peran

penting dalam meningkatkan aksesibilitas, konektivitas, fleksibilitas, efektivitas, kecepatan, mobilitas, kemudahan, serta cakupan informasi yang luas. Dalam perspektif pemerintahan, jaringan telekomunikasi berperan sebagai faktor utama keberhasilan implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dapat diasumsikan bahwa semakin tinggi tingkat pengembangan jaringan telekomunikasi, yang diprosikan melalui infrastruktur fisik BTS, semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas yang terjalin antara agen dan prinsipal. Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah: *H1: Jaringan Telekomunikasi Berpengaruh terhadap Akuntabilitas Publik*

Akses Internet

Penelitian Garcia-Murillo (2010) menunjukkan bahwa akses internet suatu negara berpengaruh terhadap tingkat transparansi dan akuntabilitas publik. Melalui studi lintas negara, ditemukan bahwa tingkat akses internet populasi berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas melalui pengurangan persepsi korupsi dan penyalahgunaan informasi keuangan. Pendapat ini diperkuat oleh Margetts (2011) yang mengungkapkan adanya pengaruh positif dari tingginya akses internet terhadap sistem demokrasi. Hal ini terjadi karena internet menyediakan berbagai platform komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat.

Fungsi *checks and balances* dalam media melalui akses internet global juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Berkurangnya peluang penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan serta pencegahan korupsi menjadi dampak positif dari akses internet terhadap akuntabilitas pemerintahan (Starke et al., 2016). Selain itu, akses internet dan teknologi *Internet of Things* (IoT) memungkinkan terciptanya akuntabilitas melalui peningkatan tanggung jawab dan kepercayaan publik (Crabtree et al., 2018). Dengan demikian, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah: *H2: Akses Internet Berpengaruh terhadap Akuntabilitas Publik*

Pengembangan Teknologi

Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat menekan tingkat korupsi serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Ionescu (2013) dan Sohag et al., (2021) menegaskan bahwa TIK merupakan alat utama dalam mewujudkan transparansi. Selain itu, penelitian Charoensukmongkol & Moqbel (2014) (2014) menunjukkan bahwa pengembangan TIK memiliki hubungan negatif dengan korupsi dan kecurangan dalam laporan keuangan. Dengan kata lain, semakin berkembang infrastruktur TIK di suatu wilayah, semakin tinggi pula tingkat transparansi dan akuntabilitas yang dapat dicapai (Mahmood, 2018).

Sabani (2019) merekomendasikan pemanfaatan TIK di negara berkembang seperti Indonesia sebagai strategi untuk mengurangi asimetri informasi, termasuk korupsi, penipuan, dan penyalahgunaan wewenang, guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan publik. Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah: *H3: Pengembangan Teknologi Berpengaruh terhadap Akuntabilitas Publik*

Pemerintahan Elektronik (E-Government)

E-Government didefinisikan sebagai pemanfaatan TIK untuk meningkatkan layanan publik dan interaksi antara pemerintah dengan masyarakat, dunia usaha, serta entitas pemerintahan lainnya. Implementasi *smart city* merupakan salah satu bentuk keberhasilan e-government, di mana teknologi mendukung sistem pemerintahan yang lebih efektif dan transparan. Kominfo (2020) menjelaskan bahwa pengembangan *smart city* didasarkan pada enam pilar utama, yaitu *smart environment*, *smart economy*, *smart branding*, *smart society*, *smart governance*, dan *smart living*. Dengan demikian, semakin baik keterlibatan pemerintah daerah dalam mengembangkan *smart city*, semakin baik pula implementasi tata kelola berbasis elektronik. Sementara itu, Ciborra (2009) menyoroti tantangan yang dihadapi dalam implementasi e-government, termasuk kesenjangan digital dan hambatan komunikasi jarak jauh.

Penelitian Lupu & Lazar (2015) menunjukkan bahwa e-government berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas melalui pengurangan tingkat korupsi. Aritonang (2017) juga menyatakan

bahwa dengan dukungan dana, teknologi informasi, manajemen, dan sumber daya manusia yang memadai, e-government dapat meningkatkan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan. Oleh karena itu, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah: *H4: E-Government Berpengaruh terhadap Akuntabilitas Publik*

Aksesibilitas Situs Web

Keberadaan portal *Data.gov* menjadi strategi utama pemerintah dalam meningkatkan layanan sektor publik dan memperkuat akuntabilitas (Utama, 2020). Berbagai situs web telah berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap administrasi pemerintahan. Akses informasi yang lebih luas memungkinkan masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Shende & Bennett (2004) menekankan bahwa kemudahan dalam mengunggah dan mengunduh dokumen yang berisi informasi pemerintahan melalui situs web merupakan indikator utama akuntabilitas yang telah tercapai. Oleh karena itu, kemudahan akses terhadap situs web pemerintahan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik. Berdasarkan kajian ini, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah: *H5: Aksesibilitas Situs Web Berpengaruh terhadap Akuntabilitas Publik*

Visibilitas Media

Di beberapa negara, media massa berperan sebagai forum akuntabilitas bagi politisi (Bovens, 2007). Dalam sistem demokrasi, fungsi kontrol media terhadap kebijakan publik dapat meningkatkan transparansi pemerintahan. Maia (2009) menegaskan bahwa liputan media yang intensif dapat memicu reaksi publik terhadap kebijakan tertentu, sehingga meningkatkan akuntabilitas pejabat publik. Selain itu, penelitian Bagger (2021) menunjukkan bahwa eksposur media sosial yang tinggi juga berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas. Maggetti (2011) menambahkan bahwa media yang independen memiliki kredibilitas tinggi dalam mengawasi tindakan pemerintah. Oleh karena itu, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah: *H6: Visibilitas Media Berpengaruh terhadap Akuntabilitas Publik*

Pengadaan Elektronik (E-Procurement)

Penerapan e-procurement dalam belanja pemerintah telah terbukti mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara (Panda et al., 2010). Neupane et al. (2012) menemukan bahwa e-procurement memiliki potensi dalam mengurangi korupsi karena sistem ini menyediakan mekanisme audit otomatis yang dapat ditelusuri secara digital. Dengan demikian, penerapan e-procurement dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan. Berdasarkan temuan ini, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah: *H7: Pengadaan Elektronik Berpengaruh terhadap Akuntabilitas Publik*

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pemerintah daerah tingkat II di Indonesia, dengan fokus khusus pada pemerintah kabupaten. Pemilihan sampel dilakukan secara purposive berdasarkan peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diperoleh dari Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) tahun 2020 hingga 2022 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Laporan EPPD merupakan evaluasi resmi yang disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, yang menilai kinerja daerah dari aspek tata kelola, pelayanan publik, dan akuntabilitas. Pemerintah provinsi, daerah administratif (seperti DKI Jakarta), dan pemerintah kota dikecualikan dari cakupan sampel karena perbedaan struktur organisasi, kewenangan, dan kompleksitas tata kelola. Berdasarkan kriteria ini, terpilihlah 150 pemerintah kabupaten dengan data lengkap selama periode tiga tahun berturut-turut, menghasilkan 450 observasi dalam bentuk panel data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sumber data sekunder yang diperoleh melalui teknik dokumentasi dan studi literatur, meliputi data dari laporan EPPD Kemendagri, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit BPK RI, indikator sistem pemerintahan berbasis

elektronik (SPBE), serta data dukung lainnya yang diperoleh dari situs web resmi pemerintah kabupaten dan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS)..Variabel penelitian serta operasionalisasinya disajikan dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Operasionalisasi Variabel
Akuntabilitas Publik (Y)	Diukur secara kuantitatif berdasarkan opini audit: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) = 5, Wajar Dengan Pengecualian (WDP) = 4, Tidak Wajar (TW) = 3, Disclaimer (TMP) = 2, Tidak Memberikan Pendapat = 1. (Sumber: Rahim & Martani, 2016)
Jaringan Telekomunikasi (X1)	Jumlah penyedia layanan telekomunikasi (<i>provider</i>) yang diukur melalui jumlah Menara Pemancar Basis (<i>Base Transceiver Station</i> - BTS) di setiap daerah.
Akses Internet (X2)	Diukur berdasarkan tingkat penetrasi internet (jumlah akses) untuk setiap wilayah pada periode 2020-2022. (Sumber: Rahim & Martani, 2016)
Perkembangan Teknologi (X3)	Indeks perkembangan teknologi pada tingkat provinsi untuk periode 2020-2022.
E-Government (X4)	Diukur berdasarkan status daerah sebagai bagian dari program 100 <i>Smart Cities</i> Indonesia pada tahun 2020 (1 = termasuk, 0 = tidak termasuk).
Aksesibilitas Situs Web (X5)	Diukur berdasarkan skor indeks aksesibilitas situs web pemerintah daerah. (Sumber: Mistry & Jalal, 2012)
Visibilitas Media (X6)	Jumlah pencarian dan indeks berita terkait pemerintah daerah yang muncul di mesin pencari Google. (Sumber: Laswad & Tennyson, 2005)
Pengadaan Elektronik (X7)	Frekuensi pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui sistem <i>e-procurement</i> pada setiap pemerintah daerah. (Sumber: Pengarang, 2021)

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif, analisis regresi data panel, dan analisis jalur (*path analysis*). Seluruh analisis dilakukan menggunakan perangkat lunak *EViews 9*.

HASIL PENELITIAN

Ringkasan hasil uji regresi data panel menggunakan model efek acak yang ditampilkan pada tabel di bawah ini memberikan interpretasi sebagai berikut:

Table 4.1. Ringkasan Uji Regresi Persamaan

Variabel	Koefisien Beta Ternormalisasi	Statistik t	Sig.	Arah Hipotesis	Hasil
Jaringan Telekomunikasi (X1)	0,000174	0,218992	0,8268	+	H8 ditolak
Akses Internet (X2)	-0,004222	-1,081753	0,2800	+	H9 ditolak
Pengembangan Teknologi (X3)	0,104362	2,150756	0,0320	+	H10 diterima
E-Government (X4)	-0,081758	-1,503440	0,1334	+	H11 ditolak
Aksesibilitas Website (X5)	0,017864	4,760822	0,0000	+	H12 diterima
Visibilitas Pers (X6)	0,00000399	2,828309	0,0049	+	H13 diterima
Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik (X7)	-0,000265	-1,556324	0,1203	+	H14 ditolak
Konstanta	2,926593	7,768949	0,0000	-	-

Sumber: Olah Data Penulis

Hasil pengujian regresi table diatas menunjukkan bahwa nilai R-kuadrat (R^2) sebesar 0,136385, yang berarti bahwa sekitar 13,64% variasi dalam variabel dependen yaitu *Akuntabilitas Publik* (Y) dapat dijelaskan oleh ketujuh variabel independen yang digunakan dalam model, yaitu *Jaringan Telekomunikasi, Akses Internet, Pengembangan Teknologi, E-Government, Aksesibilitas Website, Visibilitas Pers, dan Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik*. Sementara itu, nilai R-kuadrat Terkoreksi (Adjusted R^2) sebesar 0,122708 menunjukkan bahwa setelah mempertimbangkan jumlah variabel dalam model dan jumlah sampel, kontribusi penjelasan model terhadap variasi akuntabilitas publik tetap berada pada kisaran 12,27%, yang mengindikasikan bahwa model ini memiliki kekuatan penjelas yang masih terbatas dan terdapat faktor lain di luar model yang turut memengaruhi akuntabilitas publik.

Selanjutnya, nilai statistik F sebesar 9,971739 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000000 ($p < 0,01$) menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan secara statistik, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan, variabel-variabel independen yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, yaitu *Akuntabilitas Publik*. Temuan ini memberikan justifikasi bahwa model layak digunakan untuk analisis lebih lanjut, meskipun nilai R-kuadrat masih relatif rendah.

1. Variabel X1 (*Jaringan Telekomunikasi*) terhadap *Akuntabilitas Publik* (Y) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,82, yang lebih besar dari taraf signifikansi 5% (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa H_0 diterima, sehingga variabel *Jaringan Telekomunikasi* (X1) tidak memiliki pengaruh langsung terhadap *Akuntabilitas Publik* (Y).
2. Variabel X2 (*Akses Internet*) menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,28, yang lebih besar dari taraf signifikansi 5% (0,05). Dengan demikian, H_0 diterima, yang berarti variabel *Akses Internet* (X2) tidak berpengaruh terhadap *Akuntabilitas Publik* (Y).
3. Variabel X3 (*Pengembangan Teknologi*) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,032, yang lebih kecil dari taraf signifikansi 5% (0,05). Oleh karena itu, H_0 ditolak, yang menunjukkan bahwa variabel *Pengembangan Teknologi* (X3) berpengaruh secara langsung terhadap *Akuntabilitas Publik* (Y). Koefisien beta sebesar 0,1043 menunjukkan pengaruh positif. Artinya, setiap peningkatan 1% dalam tingkat *Pengembangan Teknologi* akan meningkatkan *Akuntabilitas Publik* sebesar 0,104%.
4. Variabel X4 (*E-Government*) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,1334, yang lebih besar dari taraf signifikansi 5% (0,05). Oleh karena itu, H_0 diterima, yang berarti variabel *E-Government* tidak memiliki pengaruh terhadap *Akuntabilitas Publik* (Y).
5. Variabel X5 (*Aksesibilitas Website*) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0000, yang lebih kecil dari taraf signifikansi 5% (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak, sehingga variabel *Aksesibilitas Website* berpengaruh terhadap *Akuntabilitas Publik* (Y). Koefisien beta sebesar 0,0178 menunjukkan pengaruh positif, yang berarti bahwa peningkatan 1% dalam *Aksesibilitas Website* akan meningkatkan *Akuntabilitas Publik* sebesar 0,018%.
6. Variabel X6 (*Visibilitas Pers*) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0049, yang lebih kecil dari taraf signifikansi 5% (0,05). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel X6 berpengaruh terhadap variabel Y. Koefisien beta sebesar 3,99 menunjukkan bahwa peningkatan 1% dalam *Visibilitas Pers* akan meningkatkan *Akuntabilitas Publik* sebesar 3,99%.
7. Variabel X7 (*Pengadaan Secara Elektronik*) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,123, yang lebih besar dari taraf signifikansi 5% (0,05). Oleh karena itu, H_0 diterima, yang berarti variabel X7 tidak memiliki pengaruh terhadap *Akuntabilitas Publik* (Y).

Berdasarkan analisis parsial (uji t) di atas, persamaan regresi data panel dapat dituliskan sebagai berikut: $Y = 2,926593 + 0,000174X_1 - 0,004222X_2 + 0,104362X_3 - 0,081758X_4 + 0,017864X_5 + 3,99E-06X_6 - 0,000265X_7 + e$

Dengan keterangan: Y = *Akuntabilitas Publik*

X1 = *Jaringan Telekomunikasi*

X2 = *Akses Internet*

X3 = *Pengembangan Teknologi*

X4 = *E-Government*

X5 = Aksesibilitas Website

X6 = Visibilitas Pers

X7 = Pengadaan Secara Elektronik

e = Kesalahan Residual

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu Akuntabilitas Publik (Y). Hasil uji F menunjukkan nilai probabilitas (F-statistic) sebesar 0,000, yang lebih kecil dari taraf signifikansi 5% (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan, variabel independen yang terdiri dari Jaringan Telekomunikasi (X1), Akses Internet (X2), Pengembangan Teknologi (X3), E-Government (X4), Aksesibilitas Website (X5), Visibilitas Pers (X6), dan Pengadaan Secara Elektronik (X7) berpengaruh terhadap Akuntabilitas Publik (Y).

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur sejauh mana model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa nilai adjusted R-squared sebesar 0,1227, yang berarti bahwa variabel independen dalam penelitian ini menjelaskan 12,27% variasi Akuntabilitas Publik, sedangkan sisanya 87,73% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Nilai adjusted R-squared yang relatif rendah ini menunjukkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini belum mampu secara signifikan memprediksi variabel Akuntabilitas Publik.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Jaringan Telekomunikasi (X1) tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Publik (Y) dengan nilai probabilitas sebesar 0,8268 ($> 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan infrastruktur telekomunikasi nirkabel tidak secara langsung meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho & Purbokusumo (2020), Sastria & Seputro (2022), Enaifoghe (2023), Al-Khasawneh et al. (2019), dan Kennedy et al., (2024), yang menyatakan bahwa keberadaan infrastruktur telekomunikasi, seperti menara BTS, mampu meningkatkan keterbukaan dan transparansi pemerintah. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh faktor teknis dalam pengukuran variabel, serta perbedaan dalam karakteristik wilayah dan distribusi infrastruktur telekomunikasi di Indonesia sebagai negara kepulauan (Kominfo, 2020).

Hasil uji terhadap variabel Akses Internet (X2) menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,2800 ($> 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa akses internet tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah daerah. Penggunaan perangkat komputer dan modem sebagai media akses internet tidak secara langsung meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik. Hasil ini bertentangan dengan penelitian Garcia-Murillo (2010), Margetts (2011), Starke et al. (2016), dan Crabtree et al. (2018), yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi internet mampu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi layanan publik. Perbedaan ini kemungkinan disebabkan oleh perbedaan karakteristik negara, kondisi infrastruktur teknologi informasi, serta tingkat aksesibilitas internet di berbagai wilayah di Indonesia (Kominfo, 2020).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Pengembangan Teknologi (X3) memiliki pengaruh positif terhadap Akuntabilitas Publik (Y). Semakin tinggi tingkat pengembangan teknologi yang dimiliki suatu daerah, semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas yang dihasilkan melalui opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil ini sejalan dengan penelitian Ionescu (2013), Sohag et al., (2021), Charoensukmongkol & Moqbel (2014), Mahmood (2018) serta Sabani (2019), yang menegaskan bahwa teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta mengurangi tingkat korupsi dalam pelaporan keuangan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa tidak terdapat korelasi antara variabel E-Government (X4) dengan Akuntabilitas Publik (Y). Hasil ini menunjukkan bahwa implementasi e-government melalui program smart city belum secara signifikan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Temuan ini bertentangan dengan penelitian Lupu & Lazar (2015), yang menyatakan bahwa penerapan e-government mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

sistem pemerintahan. Penelitian ini mendukung hasil penelitian Juliyanti (2022), Juliyanti (2023) namun bertentangan dengan kesimpulan dalam studi Biswan & Utomo (2022) dan Rusdy & Flambonita (2023).

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Aksesibilitas Website (X5) memiliki hubungan positif dengan variabel Akuntabilitas Publik (Y), sebagaimana dibuktikan oleh nilai signifikansi yang lebih kecil dari 5%. Keberadaan situs web resmi pemerintah daerah mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan tanpa harus mengaksesnya secara langsung (offline), sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Utama (2020) serta Shende dan Bennet (2004) yang menyatakan bahwa ketersediaan laporan keuangan melalui situs web pemerintah dapat meningkatkan akuntabilitas publik. Semakin mudah masyarakat mengakses situs web untuk memperoleh informasi, semakin tinggi pula insentif bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada publik.

Pengujian hipotesis juga membuktikan bahwa variabel Visibilitas Pers (X6) memiliki pengaruh positif terhadap opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan daerah, yang merupakan salah satu indikator akuntabilitas publik (Y). Hasil ini menunjukkan bahwa eksposur media terhadap pemerintah daerah berkontribusi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik. Temuan ini konsisten dengan penelitian Bovens (2007), Maia (2009), Magetti (2011), dan Bagger (2021), yang menekankan bahwa media massa berperan sebagai mekanisme kontrol terhadap pemerintah. Peran pers melalui indeks berita daring berkontribusi dalam meningkatkan akuntabilitas publik pemerintah daerah karena dapat memicu respons pro dan kontra dari masyarakat, sehingga mendorong peningkatan keterbukaan dan pertanggungjawaban pemerintah kepada publik.

Sementara itu, variabel Pengadaan Secara Elektronik (X7) memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, yang menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas publik. Metode penyediaan barang dan jasa secara elektronik yang diterapkan saat ini belum sepenuhnya mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik. Temuan ini bertentangan dengan hasil penelitian Panda et al. (2010) dan Neupane et al. (2012), yang menyatakan bahwa penerapan e-procurement dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pemerintah. Perbedaan hasil ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti cakupan pengukuran yang hanya berfokus pada e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa, tanpa mempertimbangkan jenis belanja lainnya yang dilakukan pemerintah untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik. LKPP (2019) mencatat bahwa nilai transaksi melalui tender elektronik mencapai Rp1,7 triliun, namun jumlah tersebut belum mencerminkan keseluruhan pengadaan pemerintah daerah. Dengan demikian, sistem pengadaan elektronik (LPSE) belum sepenuhnya mengkomodasi seluruh transaksi belanja daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *e-Government maturity* yang diukur menggunakan konsep *Smart City* tidak berpengaruh signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas publik, yang diukur melalui pengungkapan laporan keuangan daerah dan opini audit BPK. Temuan ini bertentangan dengan banyak penelitian sebelumnya dan dapat dijelaskan melalui beberapa faktor berikut:

1. Pertama, inisiatif *Smart City* di Indonesia lebih banyak berfokus pada pembangunan infrastruktur digital, peningkatan layanan publik, serta inovasi teknologi, tetapi belum tentu mengarah pada peningkatan transparansi keuangan dan akuntabilitas pemerintah daerah. Implementasi *e-Government* di banyak daerah masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem manajemen keuangan daerah. Akibatnya, meskipun terdapat transformasi digital, hal tersebut belum berdampak langsung pada praktik pengungkapan laporan keuangan atau kualitas audit.
2. Kedua, efektivitas *e-Government* dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sangat bergantung pada kualitas institusi, budaya tata kelola, serta mekanisme penegakan hukum. Di banyak daerah, adopsi teknologi digital masih menghadapi kendala seperti lemahnya pengawasan regulasi, resistensi birokrasi, serta keterbatasan sumber daya manusia yang terampil. Tanpa

pengawasan institusional yang kuat, keberadaan teknologi *Smart City* dapat bersifat seremonial dan tidak benar-benar meningkatkan praktik akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.

3. Ketiga, pendekatan pengukuran dalam penelitian ini yang hanya berfokus pada indikator *Smart City* mungkin belum sepenuhnya mencerminkan kompleksitas *e-Government maturity*. Dimensi lain, seperti keterbukaan data, interoperabilitas antar sistem pemerintahan, serta partisipasi masyarakat dalam tata kelola digital, kemungkinan lebih berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas publik. Ketiadaan dimensi-dimensi ini dalam model penelitian dapat menjadi salah satu penyebab hubungan yang tidak signifikan.
4. Terakhir, peran lembaga pengawasan eksternal seperti *Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)* dapat menjadi faktor moderasi dalam hubungan antara *e-Government* dan akuntabilitas publik. Karena pengungkapan laporan keuangan dan opini audit lebih dipengaruhi oleh regulasi serta kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan, keberadaan inisiatif *Smart City* saja mungkin tidak cukup untuk mendorong peningkatan akuntabilitas keuangan. Diperlukan penegakan hukum yang lebih kuat serta reformasi institusional agar transformasi digital dapat menghasilkan dampak nyata terhadap transparansi dan akuntabilitas publik.

Temuan ini mengindikasikan perlunya penelitian lebih lanjut untuk menyempurnakan pengukuran *e-Government maturity* dengan memasukkan indikator yang lebih komprehensif di luar konsep *Smart City*. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi faktor moderasi seperti kualitas tata kelola, efektivitas regulasi, dan kapasitas institusi guna memahami lebih dalam hubungan kompleks antara transformasi digital pemerintahan dan akuntabilitas publik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian regresi data panel, analisis jalur, serta pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa determinan teknologi yang diprosikan dalam variabel Jaringan Telekomunikasi (X1), Akses Internet (X2), Perkembangan Teknologi (X3), e-Government (X4), Aksesibilitas Website (X5), Visibilitas Pers (X6), dan Pengadaan Secara Elektronik (X7) secara simultan memiliki hubungan yang signifikan dengan akuntabilitas publik, sebagaimana ditunjukkan oleh hasil uji F-statistik. Namun, berdasarkan uji parsial (uji t), hanya variabel Perkembangan Teknologi (X3), Aksesibilitas Website (X5), dan Visibilitas Pers (X6) yang terbukti memiliki pengaruh langsung terhadap Akuntabilitas Publik (Y). Penelitian ini tidak menemukan adanya pengaruh langsung yang signifikan dari variabel Jaringan Telekomunikasi (X1), Akses Internet (X2), e-Government (X4), dan Pengadaan Secara Elektronik (X7) terhadap Akuntabilitas Publik (Y). Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan terkait pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik. Adanya pengaruh signifikan dari beberapa variabel teknologi, seperti aksesibilitas situs web dan visibilitas media, menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam pengungkapan laporan keuangan dapat menjadi strategi penting bagi instansi pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini memiliki sejumlah implikasi penting, baik dari sisi kebijakan publik maupun pengembangan teori tata kelola pemerintahan berbasis teknologi. Pertama, meskipun secara simultan variabel-variabel teknologi seperti jaringan telekomunikasi, akses internet, pengembangan teknologi, e-government, aksesibilitas website, visibilitas pers, dan pengadaan elektronik secara bersama-sama berkontribusi terhadap akuntabilitas publik, namun hanya sebagian kecil yang terbukti signifikan secara parsial. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua bentuk pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara otomatis dapat meningkatkan akuntabilitas publik di pemerintah daerah.

Kedua, temuan bahwa aksesibilitas website dan visibilitas media memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik menegaskan pentingnya keterbukaan informasi sebagai sarana untuk mendorong transparansi. Pemerintah daerah perlu menaruh perhatian lebih pada

pengelolaan situs web resmi, termasuk menyediakan data keuangan dan laporan kinerja yang mudah diakses dan dipahami oleh publik. Demikian pula, keterlibatan media sebagai saluran pengawasan publik perlu diposisikan sebagai bagian integral dari sistem tata kelola, karena sorotan media berperan sebagai penguat penting akan kewajiban akuntabilitas.

Ketiga, pengaruh positif perkembangan teknologi terhadap akuntabilitas publik menandakan bahwa investasi dalam infrastruktur dan inovasi TIK yang lebih terencana, tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memberikan dampak terhadap kualitas pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan. Hal ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kapasitas teknologi, SDM, serta infrastruktur digital guna mendukung manajemen keuangan daerah yang lebih transparan.

Keempat, tidak ditemukannya pengaruh signifikan dari e-government dan pengadaan elektronik terhadap akuntabilitas publik, khususnya dalam konteks penerapan program Smart City, menunjukkan bahwa pendekatan digital tanpa integrasi sistem manajemen keuangan dan keterlibatan institusional yang kuat belum cukup untuk mendorong akuntabilitas. Ini menandakan bahwa transformasi digital harus diiringi dengan pembenahan kelembagaan, penguatan regulasi, dan peningkatan kualitas tata kelola. Inisiatif Smart City yang hanya berfokus pada pelayanan publik berbasis aplikasi dan tidak terhubung secara langsung dengan sistem pelaporan keuangan cenderung bersifat simbolik atau parsial.

Kelima, hasil ini juga memperlihatkan adanya ketimpangan antara kesiapan teknologi dan penerapan prinsip-prinsip good governance. Oleh karena itu, perlu adanya strategi pengembangan e-government yang lebih komprehensif dan terintegrasi, yang tidak hanya menekankan digitalisasi, tetapi juga memperkuat aspek akuntabilitas melalui sistem pelaporan real-time, keterbukaan data anggaran, serta mekanisme pelibatan publik.

Dari sisi akademik, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperluas pemahaman mengenai hubungan antara e-government maturity dan akuntabilitas publik, dengan menambahkan variabel-variabel yang lebih kontekstual serta pendekatan panel data. Implikasi teoretisnya adalah perlunya pendekatan multidimensi dalam mengukur e-government maturity, tidak hanya berdasarkan kehadiran digital (misalnya, situs web atau aplikasi), tetapi juga integrasi sistem informasi keuangan, partisipasi masyarakat, dan efektivitas pengawasan eksternal.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi Kementerian Dalam Negeri, BPK, Bappenas, dan LKPP untuk merumuskan kebijakan yang mendorong integrasi antara teknologi digital dan sistem akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga perlu diberikan pendampingan dalam menyusun roadmap transformasi digital yang tidak hanya menargetkan peningkatan layanan, tetapi juga peningkatan keterbukaan dan pertanggungjawaban keuangan.

Dengan demikian, implikasi utama dari penelitian ini adalah perlunya reposisi peran TIK sebagai instrumen strategis untuk memperkuat akuntabilitas publik, melalui sinergi antara teknologi, regulasi, kelembagaan, dan partisipasi publik. Hal ini akan memperkuat proses pengambilan keputusan yang transparan dan responsif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di era digital.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pengukuran *e-Government* dalam studi ini hanya didasarkan pada program *Smart City*, sementara terdapat dimensi lain yang relevan, seperti keterpaduan sistem, keterbukaan data, dan penggunaan teknologi oleh masyarakat, yang belum terakomodasi dalam model penelitian. Selain itu, hasil analisis menunjukkan bahwa beberapa variabel, terutama *e-Government* dan *e-Procurement*, tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik. Mengingat temuan ini berbeda dari beberapa penelitian sebelumnya, diperlukan analisis lebih mendalam untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan tersebut.

Koefisien determinasi yang rendah (Adjusted R-square sebesar 12,27%) juga mengindikasikan bahwa sebagian besar variabilitas akuntabilitas publik dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan variabel, termasuk faktor lain yang berpotensi memengaruhi akuntabilitas publik, serta mempertimbangkan metode pengukuran yang lebih komprehensif guna meningkatkan validitas hasil

penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abanumy, A., Al-badi, A., & Mayhew, P. (2005). e-Government Website Accessibility : In-Depth Evaluation of Saudi Arabia and Oman. *The Electronic Journal of E-Government*, 3(3), 99–106.
- Amri, U., Adiando, & As'ari, H. (2022). Kebijakan Inovasi dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Dumai. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 12201–12207.
- Anderson, B., Curristine, T., & Merk, O. (2006). OECD Journal on Budgeting. *Oecd Journal on Budgeting*, 6(6), 1608–7143.
- Apa, H. R. (2013). Information and Communication Technology in Education. Yogyakarta: Andi.
- Arief, A., & Yunus Abbas, M. (2021). Kajian Literatur (Systematic Literature Review): Kendala Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). *PROtek : Jurnal Ilmiah Teknik Elektro*, 8(1), 1–6. <https://doi.org/10.33387/protk.v8i1.1978>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2020). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2020. Jakarta: BPK RI.
- Bagger, C. (2021). Social Media and Work: A Framework of Eight Intersections. *International Journal of Communication*, 15(8018), 2027–2046.
- Basri, A. B., Ramadhan, A. R., Alfiah, A., Fikri, W. K., Fadilah, M. R., Khaira, M., & Encep, M. (2023). Sistem Informasi Pelayanan Publik Berbasis Aplikasi Dalam Konsep Smart City Kota Bogor. *Karimah Tauhid*, 2(1), 203–213.
- Bertot, J. C., Jaeger, P. T., & Grimes, J. M. (2010). Using ICTs to create a culture of transparency: E-government and social media as openness and anti-corruption tools for societies. *Government Information Quarterly*, 27(3), 264–271. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2010.03.001>
- Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European Law Journal*, 13(4), 447-468. <https://doi.org/10.1111/j.14680386.2007.00378.x>
- BPK RI. (2020). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2019. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
- Bradbard, D. A., & Peters, C. (2010). Web accessibility theory and practice: An introduction for university faculty. *Journal of Educators Online*, 7(1), 1–46. <https://doi.org/10.9743/JEO.2010.1.1>
- Busdir. (2022). *Principal-Agent Dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Dasar (Studi Kasus: Program Anak Tidak Sekolah) Di Kabupaten Mamuju Tengah*. 1–83.
- Charoensukmongkol, P., & Moqbel, M. (2014). Does Investment in ICT Curb or Create More Corruption? A Cross-Country Analysis. *Public Organization Review*, 14(1), 51–63. <https://doi.org/10.1007/s11115-012-0205-8>
- Choirunnisa, L., Oktaviana, T. H. C., Ridlo, A. A., & Rohmah, E. I. (2023). Peran Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Meningkatkan Aksesibilitas Pelayanan Publik di Indonesia. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 3(1), 71–95. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v3i1.401>
- Ciborra, C. (2005). Interpreting e-government and development: Efficiency, transparency or governance at a distance? *Information Technology and People*, 18(3), 260–279. <https://doi.org/10.1108/09593840510615879>
- Crabtree, A., Lodge, T., Colley, J., Greenhalgh, C., Glover, K., Haddadi, H., Amar, Y., Mortier, R., Li, Q., Moore, J., Wang, L., Yadav, P., Zhao, J., Brown, A., Urquhart, L., & McAuley, D. (2018). Building accountability into the Internet of Things: the IoT Databox model. *Journal of Reliable Intelligent Environments*, 4(1), 39–55. <https://doi.org/10.1007/s40860-018-0054-5>
- D. Mutiarin and B. Winarno. (2020). *Komunikasi Kebijakan Publik di Era Digital* (Issue December).
- Darusalam, D., Janssen, M., Sohag, K., Omar, N., & Said, J. (2021). The Influence of ICT on the Control of Corruption: A Study Using Panel Data From ASEAN Countries. *International Journal of Public Administration in the Digital Age*, 8(1), 16–31. <https://doi.org/10.4018/IJPADA.20210101.0a2>
- Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. (2022). Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

- Daerah (EPPD) Tahun 2020–2022. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- FAO. (2016). Information and communication technologies (ICTs) in agriculture. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Gijrath, S. J. H. (2017). Telecommunications networks: Towards smarter regulation and contracts? *Competition and Regulation in Network Industries*, 18(3–4), 175–197. <https://doi.org/10.1177/1783591718782305>
- Harold D. Lasswell. (1948). The Structure and Function of Communication in Society. *The Communication of Ideas*, 55(1), 37–51.
- Hasan, R., Setiawan, A., Kustiawan, M. R., & Nursetiawan, I. (2024). Implementation Of E-Government To Improve Public Transparency In The Provision Of Integrated Services In Ciamis Regency. *Jurnal Ilmu Sosial*, 22(2), 2024. <http://jurnaldialektika.com/>
- Hasanah, A. U., Andaryani, S., Sari, F. H., & Dwikurniawati, I. U. (2024). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital : Tantangan dan Peluang di Pemerintah Daerah. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(5), 5228–5235. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Hussein Al- Khasawneh, R. O., Mohamed bshayreh, M. M., & Ali Al-Oqool, M. (2019). Impact of the Development of ICT Infrastructure and Security on the Effectiveness of Accounting Information in the Jordanian Banking Sector. *International Business Research*, 12(12), 93. <https://doi.org/10.5539/ibr.v12n12p93>
- Ibrahim, A., Arief, A., & Abdullah, S. Do. (2020). Keamanan Untuk Penerapan Layanan Publik Pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe): Sebuah Kajian Pustaka Sistematis. *IJIS - Indonesian Journal On Information System*, 5(2), 135. <https://doi.org/10.36549/ijis.v5i2.105>
- Jaffe, A. B., Newell, R. G., & Stavins, R. N. (2001). Technological Change and the Environment (October 2001). *KSG Working Paper No. 00-002, Available*(November).
- Kominfo. (2020). Pembangunan Infrastruktur TIK Nasional: Distribusi BTS dan Pemerataan Akses Digital. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. <https://www.kominfo.go.id>
- Katharina, Ricis. *Pelayanan Publik & Pemerintahan Digital Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021.
- Kementerian PANRB. (2021). Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Kominfo. (2020). Peta Jalan Infrastruktur TIK Nasional. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- Kominfo. (2020). Statistik Telekomunikasi Indonesia 2020. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- Kominfo. (2020). Statistik Telekomunikasi Indonesia Tahun 2020. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.
- Juliyanti, W. (2022). Studi Deskriptif: Determinan Teknologi, Informasi dan Komunikasi dalam Pengungkapan LKPD di Indonesia. *Studi Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 2(2), 121–134. <https://doi.org/10.35912/sakman.v2i2.1670>
- Juliyanti, W. (2023). Akuntabilitas Publik dan Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Indonesia. *Reviu Akuntansi, Manajemen, Dan Bisnis*, 3(1), 1–17. <https://doi.org/10.35912/rambis.v3i1.2006>
- Juliyanti, W. (2024). Akuntansi keuangan pemerintah desa: Teori dan konsep (Vol. 1, p. 196). CV. Madza Media. ISBN 978-623-502-384-7
- Juliyanti, W. (2024). Akuntansi manajemen: Informasi untuk pengambilan keputusan (Vol. 1, p. 158). CV. Madza Media. ISBN 978-623-502-380-9
- Juliyanti, W. (2024). Pengantar akuntansi sektor publik di Indonesia (Vol. 1, p. 198). CV. Madza Media. ISBN 978-623-502-385-4
- Kennedy, A., Surya, W. H., & Wartoyo, F. X. (2024). Tantangan dan Solusi Penerapan E-Government di Indonesia. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 4(2), 134–147. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v4i2.4459>
- Kristian, I. (2023). Kebijakan Publik dan Tantangan Implementasi Di Indonesia. *Jurnal*

- DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 88–98.
<http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/view/7>
- La Adu, arifin, Hartanto, R., & Fauziati, S. (2022). Hambatan-Hambatan Dalam Implemetasi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe) Pada Pemerintah Daerah. *JIKO (Jurnal Informatika Dan Komputer)*, 5(3), 215–223. <https://doi.org/10.33387/jiko.v5i3.5344>
- Laswad, F., Fisher, R., & Oyelere, P. (2005). Determinants of voluntary Internet financial reporting by local government authorities. *Journal of Accounting and Public Policy*, 24(2), 101–121. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2004.12.006>
- Leiner, B. M., Cerf, V. G., Clark, D. D., Kahn, R. E., Kleinrock, L., Lynch, D. C., Postel, J., Roberts, L. G., & Wolff, S. (2009). A brief history of the internet. *ACM SIGCOMM Computer Communication Review*, 39(5), 22–31. <https://doi.org/10.1145/1629607.1629613>
- LKPP. (2019). Laporan Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2019. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- LPSE. (2021). Statistik Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah melalui Sistem E-Procurement. Jakarta: LKPP.
- Lupu, D., & Lazăr, C. G. (2015). Influence of e-government on the Level of Corruption in some EU and Non-EU States. *Procedia Economics and Finance*, 20(15), 365–371. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(15\)00085-4](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)00085-4)
- Maggetti, M. (2011). The media accountability of independent regulatory agencies. *European Political Science Review*, 4(3), 385–408. <https://doi.org/10.1017/S1755773911000208>
- Mahmood, M., Weerakkody, V., & Chen, W. (2018). *The Role of ICT in the Transformation of Government and Citizen Trust*. 1–23.
- Mardiasmo. (2009). Public sector accounting. Yogyakarta: Andi . Publisher
- Margetts, H. (2011). The Internet and Transparency. *Political Quarterly*, 82(4), 518–521. <https://doi.org/10.1111/j.1467-923X.2011.02253.x>
- McLuhan, M. (1964). Understanding media: The extensions of man. New York: McGraw-Hill
- Muenster, T., & Watrin, C. (2023). Country-by-Country Disclosures and Firms’ Internal Information Environment. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4627324>
- Mulgan, R. (2000). ‘ ACCOUNTABILITY ’: AN EVER-EXPANDING CONCEPT ?
- Neupane, A., Soar, J., Vaidya, K., & Yong, J. (2012). *Role of public e-procurement technology to reduce corruption in government procurement ROLE OF PUBLIC E-PROCUREMENT TECHNOLOGY TO REDUCE CORRUPTION IN Arjun Neupane , Jeffrey Soar , Kishor Vaidya , and Jianming Yong This paper explores the potential of pu. May 2014.*
- Nugroho, R. A., & Purbokusumo, Y. (2020). E-Government Readiness: Penilaian Kesiapan Aktor Utama Penerapan E-Government di Indonesia E-Government Readiness: Main Actor Readiness Assessment for E-Government Application in Indonesia. *Juni*, 22(1), 1–17. <http://dx.doi.org/10.33164/iptekkom.22.1.2020.1-17>
- Octavio, M. F. R., & Urumsah, D. (2022). Determinan Transparansi Dan Akuntabilitas Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia: Model Konseptual. *Conference on Economic and ...*, 35, 1726–1735. <https://jurnal.widyagama.ac.id/index.php/cebi/article/view/83%0Ahttps://jurnal.widyagama.ac.id/index.php/cebi/article/download/83/82>
- Panda, P., Sahu, G. P., & Gupta, P. (2010). Promoting Transparency and Efficiency in Public Procurement : E-Procurement Initiatives by Government of India. *7th International Conference on E-Government (ICEG) 2010*, 22–24.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. (2010).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). (2018).
- Rahim, A., & Martani, D. (2016). Determinant of local government financial reporting quality in Indonesia. *Asian Journal of Accounting Research*, 1(2), 1–14.
- Rahim, W.M . & Dwi Martani. (2016). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Website Pemdai. Depok: Skripsi Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia

- Roland, A. (2016). 4. Technological change. In *War and Technology: A Very Short Introduction* (pp. 84–113). <https://doi.org/10.1093/actrade/9780190605384.003.0004>
- Rousiley Celi Moreira, M. (1992). *Crowd theory in some modern fiction : Dickens, Zola and Canetti, 1841-1960*. 1841–1960. <https://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.537253>
- Rusdy, R. M. I. R., & Flambonita, S. (2023). Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe) Di Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Good Governance. *Lex LATA*, 5(2), 218–239. <https://doi.org/10.28946/lexl.v5i2.2351>
- Sabani, A., Farah, M. H., & Sari Dewi, D. R. (2019). Indonesia in the spotlight: Combating corruption through ICT enabled governance. *Procedia Computer Science*, 161, 324–332. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.11.130>
- Sapan, G. N., Stanikzai, A. N., Sanjar, S., & Anwari, G. (2022). International Journal of Social Science Research and Review. *International Journal of Social Science Research and Review*, 5(1), 113–128. <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v6i1.826>
- Sari, R., & Muslim, M. (2023). Accountability and Transparency in Public Sector Accounting: A Systematic Review. *Amkop Management Accounting Review (AMAR)*, 3(2), 90–106. <https://doi.org/10.37531/amar.v3i2.1440>
- Sastria, A., & Seputro, H. Y. (2022). Perception of Performance of Madura Villages: Aspects of Quality of Financial Reporting, Accountability And Competence. *International Colloquium on Forensic Accounting and Governance (ICFAG)*, 2(1), 103–133. <https://conference.trunojoyo.ac.id/pub/index.php/icfag/article/view/126>
- Scott, W. R. (2009). *Financial accounting theory*. Toronto, Ont: Pearson Prentice Hall.
- Sinclair, A. (1995). The chameleon of accountability: Forms and discourses. *Accounting, Organizations and Society*, 20(2–3), 219–237. [https://doi.org/10.1016/0361-3682\(93\)E0003-Y](https://doi.org/10.1016/0361-3682(93)E0003-Y)
- Starke, C., Naab, T. K., & Scherer, H. (2016). Free to expose corruption: The impact of media freedom, internet access, and governmental online service delivery on corruption. *International Journal of Communication*, 10, 4702–4722.
- Suryanto, A. (2023). *Buku Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi. Gagasan Pembaharuan Dan Praktik Kepemimpinan*, 1–160. <https://lan.go.id/?wpdmpro=transformasi-administrasi-publik-menjawab-tantangan-era-disrupsi>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. (2004).
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (2008).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2014).
- Utama, A. A. G. S. (2020). Research in Business & Social Science The implementation of e-government in Indonesia. *International Journal of Research in Business & Social Science*, 9(7), 190–196.
- Wescott, C. G. (2001). E-Government in the Asia-pacific region. *Asian Journal of Political Science*, 9(2), 1–24. <https://doi.org/10.1080/02185370108434189>
- Yazdipour, R., & Song, M. (1986). Agency Costs and the Theory of the Firm. *Financial Review*, 21(3), 95–95. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6288.1986.tb00759.x>